

UPAYA UNICEF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK DI AFRIKA SELATAN

Andi Alan Wahid Ramdhana¹

Abstract: *This study aims to identify and describe UNICEF's efforts to improve child welfare in South Africa. The type of research used is descriptive research. The type of data used in this study is secondary data, which originates from documents or literature from various sources such as research journals, newspapers, the internet, scientific papers, theses, and others that contain relevant information and data related to the research being conducted. In explaining UNICEF's efforts to improve the welfare of children in South Africa and its relationship with the role of international organizations using the theory of the role of international organizations and the theory of child welfare. The results of the study indicate that there are several UNICEF efforts in the form of work activities/programs in improving the welfare of children in South Africa, namely collaborating with the South African government in formulating policies, Isibindi and Safe Parks programs, Private Sector Fundraising and Donors, Last Mile Plan for EMTCT (Elimination transmission from mother to child), and educational assistance.*

Keywords: *UNICEF, South Africa, Child Welfare, International Organization.*

Pendahuluan

Anak-anak sebagai generasi muda yang menjadi sumber daya manusia penerus bangsa dalam mewujudkan cita-cita perjuangan dan pembangunan suatu bangsa tentu perlu dijaga masa depannya, dengan cara memastikan bahwa pemenuhan hak-hak anak di masa kecilnya terpenuhi.

Menurut Konvensi Hak Anak PBB (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun, dan secara singkat menjelaskan hak-hak yang meliputi hak untuk bertahan hidup; tumbuh dan berkembang secara optimal; hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas; hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran; hak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka; serta hak untuk mendapatkan informasi dan komunikasi yang bermanfaat (UNICEF, 2023a).

Namun kondisi ideal terhadap pemenuhan hak-hak terhadap anak yang diharapkan ini samar terlihat pada anak-anak di Afrika Selatan. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang menimpa anak-anak di Afrika Selatan, seperti kasus kejahatan yang menimpa anak-anak di Afrika Selatan dari tahun 2006 hingga tahun 2009, dimana jenis-jenis kejahatan yang menimpa anak-anak termasuk pembunuhan, percobaan pembunuhan, semua kejahatan seksual, penyerangan umum, penyerangan dengan kerusakan tubuh parah dengan rata-rata kasus berjumlah 53.515 kasus. Selain kejahatan pada anak-anak, terdapat permasalahan ekonomi yang menimpa anak-anak di Afrika Selatan dimana permasalahan tersebut mencakup anak-anak yang tinggal di dalam rumah tangga yang miskin. Pada tahun 2007 terdapat sekitar 13 juta anak di Afrika Selatan hidup di dalam rumah tangga miskin (Hall, 2021).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : alanwahid08@gmail.com.

Dikutip dari WHO (WHO, 2005) Afrika Selatan memiliki permasalahan kesehatan pada anak dengan kasus HIV/AIDS dan tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun yang tinggi. Menurut penemuan data tahun 2003 oleh UNAIDS menemukan tingkat populasi anak yang terjangkit HIV di Afrika Selatan sekitar 970.000 jiwa, lalu juga terdapat permasalahan tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun yang menurut data tahun 2010 oleh UNICEF sekitar 51,9 angka kematian per 1000 kelahiran (UNICEF, 2023c).

Di sektor pendidikan, permasalahan yang berusaha diselesaikan yaitu tingginya kasus anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikannya di sekolah atau berhenti sekolah. Pada tahun 2013 lebih dari seperempat atau sekitar 25,3 persen anak berhenti sekolah dengan alasan keuangan (Department of Statistics South Africa, 2013).

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Afrika Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan anak seperti menandatangani dan meratifikasi beberapa konvensi dan perjanjian seperti *Convention of the Rights of the Child* dan *African Charter on the Rights and Welfare of the Child*. Namun pemerintah Afrika Selatan dalam pelaporan kemajuan implementasi kepada komite yang memantau kepatuhan terhadap konvensi ini (*African Committee on the Rights of the Child* dan *UN Committee on the Rights of the Child*) sedikit lambat (Niekerk, 2008).

Namun pada realitanya, layanan yang menjadi harapan oleh anak-anak dalam realisasi hak-hak mereka banyak menunjukkan penurunan kualitas dalam melaksanakan pelayanan karena tidak bisa secara langsung memberi perlindungan dan bantuan, serta membutuhkan layanan dalam jangka waktu yang panjang yang perlu ditempuh. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Afrika Selatan yaitu terbatasnya sumber daya. Pekerja sosial atau LSM terlalu banyak menghadapi tantangan jika difokuskan terhadap intervensi pencegahan dan disaat bersamaan juga diharapkan untuk terus menerima laporan dari anak-anak yang membutuhkan layanan individual secara hukum. Ditambah lagi, dalam pendanaan terhadap LSM, pemerintah sangat ketat dimana tidak memungkinkan untuk LSM bekerja sesuai yang diminta tanpa adanya dana yang cukup bagi mereka (Loffell, 2008). Terpecah-pecah, tidak terkoordinasi, kekurangan sumber daya, pelayanan yang kurang, standar layanan yang buruk, staf yang tidak terlatih, organisasi di bawah tekanan keuangan yang parah, pedoman kebijakan yang tidak memadai, kurangnya manajemen yang baik dan prosedur pelaporan standar merupakan daftar panjang keluhan yang disampaikan kepada pembuat kebijakan pemerintah (September, 2006).

UNICEF mulai mendukung kegiatan terkait anak-anak di Afrika Selatan pada tahun 1992 di bawah naungan UN *High Commissioner for Refugees*, mendukung pemerintah Afrika Selatan, masyarakat, dan keluarga dalam mengurangi kemiskinan anak, meningkatkan pendidikan, perawatan kesehatan dan perlindungan bagi setiap anak (UNICEF, 2020b), dan memberikan dukungan kepada LSM yang membantu perempuan dan anak-anak di antara ribuan penduduk Afrika Selatan yang kembali ke rumah setelah bertahun-tahun di pengasingan akibat dampak dari *apartheid* (Department of Foreign Affairs Republic of South Africa, 2003). Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan UNICEF pada masa-masa awal untuk Afrika Selatan antara lain mengidentifikasi permasalahan anak di Afrika Selatan seperti AIDS dan *child abuse*, konseling terhadap anak pra dan pasca tes HIV, mencetak buku cerita untuk anak-anak, dan mencetak buku pedoman untuk orang tua terkait *parenting*.

Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana upaya UNICEF dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan? Dengan tujuan penelitian

yaitu mendeskripsikan upaya UNICEF dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan.

Kerangka Teori

Teori Organisasi Internasional

Era globalisasi saat ini, semua sektor peradaban manusia semakin berkembang, termasuk dunia perpolitikan internasional yang semakin kompleks. Hal ini dibuktikan dengan aktor-aktor internasional yang berperan, tidak hanya negara namun juga terdapat keterlibatan dari organisasi-organisasi internasional seperti IGOs (*Intergovernmental Organizations*) maupun NGOs (*Non-governmental Organizations*). Dilihat dari cirinya, UNICEF merupakan IGO dimana anggotanya terdiri negara-negara yang berdaulat dan memiliki keanggotaan di dalam PBB.

Menurut Clive Archer (Archer, 2001) organisasi internasional adalah suatu struktur formal yang berkelanjutan yang berdiri atas kesepakatan negara-negara anggota baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional menurut Clive Archer memiliki tiga peran penting yaitu:

1. Instrumen, peran organisasi internasional sebagai instrumen yaitu menjadi sebuah alat bagi negara-negara anggota yang tergabung dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Archer, 2001: 68). Peran ini biasanya berlaku pada jenis organisasi internasional IGO (*Inter-Governmental Organization*) yang dimana anggotanya terdiri atas beberapa negara.
2. Arena, peran organisasi internasional sebagai arena yaitu sebagai wadah atau tempat untuk berkumpul atau mengadakan forum sebagai langkah awal pengambilan suatu tindakan. Dengan kata lain, peran sebagai arena bagi organisasi internasional yaitu sebagai tempat berdiskusi, bekerjasama, berdialog, serta menentang bagi anggota (Archer, 2001: 73)
3. Aktor, peran organisasi internasional sebagai aktor yaitu bahwa organisasi internasional memiliki kemampuan atau kapasitas aktor yang independen tanpa adanya intervensi dari pihak luar dalam menjalankan kebijakannya. (Archer, 2001: 79).

Teori di atas digunakan bertujuan untuk membahas lebih dalam tentang upaya yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan suatu permasalahan di suatu negara sekaligus peran yang dilaksanakan sebagai organisasi internasional dalam upayanya tersebut.

Teori Kesejahteraan Anak

Berbagai definisi mengenai kesejahteraan telah banyak dikemukakan oleh banyak peneliti sebelumnya. Pengertian secara umum, kesejahteraan atau sejahtera memiliki arti yaitu suatu keadaan dalam hidup manusia yang menyangkut aspek-aspek kehidupan yang mendasar bagi suatu keadaan dalam hubungan sosial. Sejahtera mengacu pada keadaan yang baik, keadaan manusia yang dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Disebutkan pada pembukaan *Declaration of the Rights of the Child* tahun 1969:

1. “Mengingat, dalam Piagam Pernyataan Negara, bahwa Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak asasi

- manusia, pada martabat dan nilai pribadi manusia, dan telah berkomitmen untuk memajukan kemajuan masyarakat dan kondisi kehidupan yang lebih baik di kebebasan yang lebih besar,
2. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan didalamnya, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya,
 3. Bahwa anak karena belum dewasa jasmani dan rohaninya, memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan,
 4. Bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus tersebut telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak tahun 1924, dan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam undang-undang badan khusus dan organisasi internasional yang peduli dengan kesejahteraan anak,
 5. Bahwa umat manusia memiliki kewajiban kepada anak untuk memberikan yang terbaik, dan menyatakan Deklarasi Hak Anak ini sampai akhir agar mereka dapat memiliki masa kanak-kanak yang bahagia dan menikmati hak-hak dan kebebasan untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan masyarakat yang tercantum di sini, dan meminta orang tua, laki-laki dan perempuan sebagai individu, dan atas organisasi sukarela, otoritas lokal dan pemerintah nasional untuk mengakui hak-hak ini dan berusaha untuk mematuhi dengan tindakan legislatif dan lainnya yang diambil secara bertahap sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:"

Menurut *Children's Bureau* (Children's Bureau, 2020) definisi kesejahteraan anak yang sangat luas dengan mudah mencakup berbagai cara menilai kesejahteraan anak, seperti kesehatan, pendidikan, status ekonomi, keluarga atau kehidupan sosial, dan masalah keselamatan atau keamanan.

UNICEF (UNICEF, 2023b) berpendapat bahwa agar anak-anak dapat memenuhi potensi penuh, sebagaimana hak asasinya, mereka membutuhkan perawatan kesehatan dan gizi, perlindungan dari bahaya dan rasa aman, kesempatan untuk belajar sejak dini, dan pengasuhan yang responsif – seperti berbicara, menyanyi dan bermain – dengan orang tua dan pengasuh yang mencintai mereka. Semua ini diperlukan untuk memelihara otak yang sedang berkembang dan bahan bakar tubuh yang sedang tumbuh.

Teori atau konsep kesejahteraan penulis gunakan bertujuan untuk mengetahui definisi kesejahteraan anak dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak untuk dijadikan sebagai indikator, agar nantinya dapat dikorelasikan dengan teori sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang relevan terhadap analisis permasalahan.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yang bersumber dari dokumen atau literatur dari berbagai macam sumber seperti jurnal penelitian, surat kabar, internet, karya ilmiah, skripsi, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Data Elektronik (*Online Research*) dan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu teknik analisis data yang

menghubungkan data satu dengan data yang lainnya yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan Kesejahteraan Anak di Afrika Selatan

Permasalahan kesehatan pada anak menjadi perhatian di Afrika Selatan yaitu dengan tingginya jumlah kasus HIV/AIDS pada anak dan angka kematian anak di bawah usia 5 tahun. Menurut UNAIDS (UNAIDS, 2021) terdapat sekitar 270.000 jiwa anak-anak terjangkit HIV di Afrika Selatan. Data dari UNICEF di tahun 2008 bahwa sekitar 5,35 juta penduduk Afrika Selatan mengidap HIV, terdapat 1.100.000 bayi lahir setiap tahunnya dan 300.000 diantaranya mengidap HIV. Hal ini juga berpengaruh pada angka kematian anak di bawah usia 5 tahun dimana penyebab dari kasus kematian anak di bawah usia 5 tahun yaitu terbesar disebabkan oleh AIDS, lalu diikuti oleh faktor kegagalan bayi baru lahir, diare, pneumonia, cedera, dan lainnya (UNICEF South Africa, 2008).

Beralih ke permasalahan di aspek pendidikan anak di Afrika Selatan, evaluasi siswa kelas 3 di tahun 2007 menemukan rata-rata nilai yang rendah yaitu 36 persen dalam membaca dan 35 persen dalam tes berhitung (UNICEF South Africa, 2010). Lebih dari seperempat total kumulatif anak-anak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan sekolahnya yaitu mayoritas dari mereka yang berasal dari daerah miskin dan rentan terhadap berbagai hambatan pendidikan. Ketimpangan akses ini juga diperparah dengan ketidaksetaraan gender dimana hanya 28,5 persen perempuan muda yang lulus perguruan tinggi dalam karir yang berhubungan dengan Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika (UNICEF, 2020b).

Di tahun 2007 sekitar 13 juta anak hidup di dalam tangga miskin (Hall, 2021). Mereka yang tinggal di daerah pedesaan cenderung lebih miskin dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan, karena 7 dari 10 orang miskin tinggal di daerah pedesaan. Angka kemiskinan di Afrika Selatan bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya, provinsi Western Cape dan provinsi Gauteng memiliki tingkat kemiskinan terendah, sedangkan provinsi Eastern Cape, provinsi Limpopo, dan provinsi Mpumalanga memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Di Eastern Cape, 78 persen anak-anak tinggal di rumah tangga miskin, sementara hanya 20 persen anak-anak tinggal di rumah tangga miskin di Gauteng (Triegaardt, 2005).

Pada periode tahun 2010 hingga 2011 menurut laporan tahunan kepolisian sebanyak 54.225 kasus kejahatan terhadap anak mulai dari pembunuhan, percobaan pembunuhan, pelanggaran seksual, serangan umum, sampai serangan dengan kerusakan tubuh yang parah (SAPS Strategic Management, 2012). Dalam laporan ini pula dijelaskan bahwa kasus kejahatan terhadap anak ini sering terjadi di lingkungan rumah tangga/keluarga. Namun UNICEF mengungkapkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan kepada polisi dengan berbagai alasan yaitu anak-anak masih terlalu muda untuk melaporkan kejahatan, takut untuk berbicara karena takut terhadap pelaku, tidak yakin dengan apa yang akan terjadi setelah melaporkan, dan tidak tahu kemana harus melapor (Viviers, 2013).

Upaya dan Permasalahan Pemerintah dalam Penanganan Kesejahteraan Anak di Afrika Selatan

Pada masa pasca demokratisasi atau bebasnya Afrika Selatan dari politik apartheid, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan anak yang terjadi di Afrika Selatan. Diawali oleh Pemerintah Persatuan Nasional yang baru dan Program Rekonstruksi dan Pembangunannya pada Kongres Nasional Afrika 1994 menunjukkan niatnya untuk mengubah kondisi kehidupan orang-orang yang paling terpinggirkan di negara dalam Buku Putih tentang Kesejahteraan Sosial.

Lalu, menyusul ratifikasi Konvensi Anak PBB oleh Afrika Selatan pada 16 Juni 1995, Konstitusi Republik Afrika Selatan yang baru diadopsi pada tahun 1996, dengan bagian khusus dan terperinci tentang hak-hak anak pada Bab 2 tentang Bill of Rights pada bagian ke 28 (Kilkelly & Liefwaard, 2019).

Terdapat pula upaya pemerintah Afrika Selatan dalam bentuk pemberian dana hibah. Ada tiga hibah untuk anak-anak dalam sistem jaminan sosial saat ini: Hibah Dukungan Anak, Hibah Anak Asuh, dan Hibah Ketergantungan Perawatan. Sistem jaminan sosial saat ini dianggap oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara, sebagai sistem yang tidak komprehensif dan terfragmentasi, sehingga banyak anak tidak menerima bantuan sama sekali (Plessis, 2007).

Namun terdapat permasalahan pada sistem pemberian dana hibah ini yaitu bahwa anak-anak berusia 7-18 tahun, anak-anak yang positif HIV dan anak jalanan dikecualikan dari hibah. Anggaran yang tidak memadai untuk memenuhi hibah ini menimbulkan masalah besar, dan keterlambatan dalam memproses hibah menimbulkan masalah administrasi yang besar.

Di Afrika Selatan, pemberian layanan masih sangat bergantung pada kumpulan organisasi masyarakat sipil (NGO) yang beraneka ragam dan tersebar tidak merata, dengan segala macam mandat dari berbagai sumber. Sebagian besar dana mereka harus dikumpulkan dari luar pemerintah. Hal ini membuat beberapa NGO kesulitan dalam melaksanakan apa yang diminta dengan kondisi dana yang minim. Permasalahan ini muncul dalam dokumen pemerintah Buku Putih untuk Kesejahteraan Sosial (bab 6, poin ke 7) bahwa pemerintah mengakui butuhnya perhatian terhadap kekurangan dana yang berkelanjutan dari layanan kesejahteraan sosial yang menjadi permasalahan.

Beberapa contoh NGO yang memberikan pelayanan kepada anak di Afrika Selatan yaitu seperti *The AIDS Foundation of South Africa* (AFSA) yang didirikan pada 1988 dengan mendukung upaya regional, lokal dan nasional untuk mengurangi infeksi HIV, IMS dan TB. AFSA bertujuan untuk mengatasi penyebab struktural dan sosial dari HIV, meningkatkan kesadaran akan penyakit menular seksual dan membangun ketahanan di masyarakat. Kemudian ada pula *CHOSA South Africa* dimana organisasi ini mendukung anak Afrika Selatan harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendapatkan asuhan dengan cara memberdayakan orang untuk mengatasi kemiskinan anak dan menghadapi apa yang menopang kemiskinan, penindasan, dan rasa ketidakberdayaan komunitas. CHOSA memberikan hibah bulanan kepada mitranya yang menyediakan rumah anak-anak, dua prasekolah, program pemberdayaan anak perempuan dan dana beasiswa dengan pakaian, makanan, obat-obatan, listrik dan air untuk anak-anak dan keluarga yang mereka asuh (Litenatsky, 2023).

Dalam mewujudkan *The Children's Act* 2005 tentunya pemerintah Afrika Selatan memerlukan berbagai praktisi layanan sosial untuk memberikan layanan sosial kepada anak-anak di bidang perawatan parsial, pengembangan anak usia dini, pencegahan dan intervensi dini, perlindungan, asuh, adopsi dan pusat penitipan anak dan remaja. Layanan ini padat karya, dan penyampaian yang efektif bergantung pada ketersediaan praktisi

terampil dalam disiplin ilmu yang relevan. Hal ini kemudian termasuk pekerja sosial, pekerja perawatan anak dan remaja dan praktisi pengembangan anak usia dini. Permasalahan selanjutnya yang dihadapi pemerintah dalam upaya penanganan permasalahan kesejahteraan anak yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan atau kemampuan dalam memberikan pelayanan terkait kesejahteraan anak.

Terdapat beberapa kategori sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan sosial, yaitu seperti pekerja sosial, pembantu pekerja perawatan anak dan remaja, pekerja pengembangan anak usia dini, pekerja pengembangan masyarakat, personil keamanan sosial, praktisi dari sektor lain, manager, staff, dan sukarelawan.

Mengapa hal kegentingan terhadap pelayanan sosial ini bisa terjadi? Loffell (Loffell et al., 2008) menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan terjadinya kegentingan terhadap kekurangan sumber daya manusia dalam pelayanan sosial di Afrika Selatan, yaitu:

1. Kekurangan pekerja di bidang layanan sosial.

Pada tahun 2005, sebanyak 11.372 pekerja sosial terdaftar di Afrika Selatan. Kurang dari setengah atau sebanyak 5.063 dari mereka dipekerjakan oleh Departemen Pembangunan Sosial dan organisasi non-profit untuk memberikan layanan sosial kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, sedangkan menurut perhitungan dibutuhkan sekitar 16.504 pekerja sosial untuk anak dibutuhkan di tahun 2010/2011. Hal ini jelas membuktikan tidak cukupnya pekerja sosial untuk menangani permintaan yang besar akan layanan yang dibutuhkan oleh anak-anak.

2. Kurangnya pengakuan terhadap para praktisi layanan sosial.

Di masa lalu, pekerja sosial dianggap sebagai penyedia utama layanan sosial. Untuk mengatasi warisan apartheid dan sebagai pengakuan atas kebutuhan yang besar, Afrika Selatan berkomitmen pada pendekatan pembangunan untuk kesejahteraan sosial. Undang-undang Anak menggeser pemberian layanan sosial ke konteks yang lebih luas dari model perkembangan kesejahteraan sosial dan menetapkan berbagai layanan sosial baru. Penyampaian hal ini bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara intensif. Secara umum peningkatan jumlah kapasitas sumber daya manusia melibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja dan diversifikasi terhadap berbagai kategori profesi layanan sosial yang diakui dan diatur, namun hanya sedikit kategori yang diterima dan diakui secara aturan hukum.

3. Pendanaan yang kurang menyebabkan tingginya pergantian staf di organisasi nirlaba.

Sebagian besar departemen pembangunan sosial provinsi mendelegasikan sebagian besar layanan sosial mereka kepada beberapa organisasi nirlaba. Namun, subsidi yang dibayarkan kepada organisasi nirlaba tersebut tidak sesuai dengan biaya layanan yang sebenarnya. Banyak layanan yang dilakukan organisasi nirlaba tidak menerima subsidi sama sekali. Layanan menjadi tidak efektif karena pendanaan yang tidak sesuai, sementara waktu dan uang yang berharga dihabiskan untuk penggalangan dana dari sumber non-pemerintah.

Hal ini juga menyebabkan pergantian staf yang sangat tinggi karena remunerasi tidak dibakukan dalam sektor tersebut dan karena pemerintah membayar gaji yang lebih tinggi kepada praktisi layanan sosial di layanan publik

daripada yang mampu dibayar oleh organisasi nirlaba kepada praktisi mereka. Pusat Perawatan Anak dan Remaja Lakehaven di Durban misalnya melaporkan bahwa pada tahun 2007 sepertiga dari pekerjaannya pergi bekerja di pemerintahan, yang menawarkan gaji bulanan awal sebesar R4.500 dibandingkan dengan di organisasi nirlaba yang hanya sebesar R2.500. Pergantian staf yang tinggi mengakibatkan kesinambungan yang buruk dan penyampaian layanan sosial yang tidak menentu yang berdampak buruk pada anak-anak pada umumnya.

Selain itu, terdapat tantangan dalam pemberian pelayanan oleh pekerja pengasuhan anak dan remaja serta pekerja pengembangan anak usia dini. Tantangan yang dihadapi pekerja pengasuhan anak dan remaja yaitu kejelasan status pekerja, strategi perekrutan dan pelatihan, pelatihan dan pengembangan tambahan untuk pembantu pekerja pengasuhan anak dan remaja, penanganan terhadap staff dengan jam kerja berlebih serta standarisasi upah. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja pengembangan anak usia dini yaitu strategi perekrutan dan pelatihan pekerja, gaji dan kondisi kerja para pekerja yang buruk, dan mendukung pengembangan anak usia dini berbasis rumah (Loffell et al., 2008).

UNICEF di Afrika Selatan

UNICEF mulai mendukung kegiatan terkait anak-anak di Afrika Selatan pada tahun 1992 di bawah naungan UN *High Commissioner for Refugees*, mendukung pemerintah Afrika Selatan, masyarakat, dan keluarga dalam mengurangi kemiskinan anak, meningkatkan pendidikan, perawatan kesehatan dan perlindungan bagi setiap anak (UNICEF, 2020b). UNICEF di awal keterlibatannya di Afrika Selatan yaitu untuk memberikan dukungan kepada LSM yang membantu perempuan dan anak-anak di antara ribuan penduduk Afrika Selatan yang kembali ke rumah setelah bertahun-tahun di pengasingan akibat dampak dari apartheid (*Department of Foreign Affairs Republic of South Africa*, 2003). UNICEF membuka *Country Office*-nya di Afrika Selatan pada tahun 1994 di ibukota Pretoria.

Beberapa upaya yang telah dilakukan UNICEF pada masa-masa awal untuk Afrika Selatan sebelum tahun 2015 yaitu mengidentifikasi permasalahan anak di Afrika Selatan seperti AIDS dan *child abuse*, konseling terhadap anak pra dan pasca tes HIV, mencetak buku cerita untuk anak-anak, dan mencetak buku pedoman untuk orang tua terkait parenting.

UNICEF juga menyadari bahwa selain permasalahan praktis terhadap kesejahteraan anak-anak, pemerintah Afrika Selatan juga memiliki permasalahan dalam rasionalisasi kebijakan serta implementasinya terhadap sistem pelayanan sosial khususnya untuk anak-anak sehingga UNICEF untuk pertama kalinya pada tahun 2015 ikut serta bekerjasama dengan pemerintah Afrika Selatan dalam mengembangkan kebijakan terpadu nasional yang mengatur tentang pemberian layanan kepada anak. Hal tersebut lah yang menjadi alasan pengambilan batasan tahun 2015 – 2018 pada penelitian ini.

Upaya UNICEF dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak di Afrika Selatan

Terdapat beberapa upaya UNICEF dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Bekerjasama Dengan Pemerintah Afrika Selatan Dalam Merumuskan *National Integrated Early Childhood Development Policy*

Pada tahun 2015, UNICEF dan pemerintah Afrika Selatan bekerjasama dalam merumuskan kebijakan terpadu nasional pengembangan anak usia dini (*National Integrated Early Childhood Development Policy*) yang memiliki visi yaitu semua bayi dan anak-anak serta keluarga mereka di Afrika Selatan hidup di lingkungan yang kondusif untuk perkembangan optimal bagi mereka (Department of Social Development, 2015).

Hal ini menjadi terobosan dalam upaya UNICEF ikut membantu meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan tidak hanya memberi bantuan secara praktis kepada anak-anak, melainkan juga membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pengembangan Sosial Afrika Selatan, Ibu BO Dlamini dalam kata pengantarnya yaitu mengakui bahwa inisiatif kebijakan yang dikembangkan ini menjadi yang pertama dalam sejarah Afrika Selatan pasca demokratisasi, dan mengakui bahwa hal ini menjadi puncak dari kerja keras selama bertahun-tahun untuk memastikan awal yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik bagi banyak anak.

Tujuan kebijakan ini dibentuk yaitu diharapkan dapat menjamin ketersediaan akses yang adil dan universal ke layanan pengembangan anak, menetapkan pengaturan keorganisasian dan kelembagaan yang diperlukan untuk memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, dan memantau penyediaan pelayanan, memastikan penyediaan pendanaan dan infrastruktur yang memadai, dan menetapkan sistem pemantauan terhadap jaminan kualitas serta keamanan pelayanan.

Kebijakan ini mencakup semua aspek yang mengarah pada pemberian arahan dan persyaratan untuk pengembangan sistem multisektoral yang komprehensif perlunya penyediaan layanan dan dukungan pengembangan anak usia dini yang dipimpin oleh pemerintah. Arahan kebijakan ini, setelah diterjemahkan ke dalam kerangka kerja legislatif, kebijakan dan program yang komprehensif, akan berlaku untuk berbagai elemen pemerintah, pemangku kepentingan non-pemerintah dan swasta, masyarakat dan orang tua atau pengasuh. Selain itu, kerangka kerja legislatif, kebijakan dan program akan memastikan formalisasi dan pengakuan layanan pengembangan anak usia dini sebagai hak universal yang dimiliki semua anak-anak, dan manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan yang dapat diberikan oleh layanan pengembangan anak usia dini menghasilkan bagi anak-anak, keluarga dan masyarakatnya, serta untuk pembangunan nasional.

Hasil dari kebijakan ini yaitu telah menetapkan arahan dan persyaratan untuk mengembangkan kerangka kerja legislatif yang komprehensif dan menyeluruh, menyediakan pendanaan dan sumber daya publik yang memadai, dan membangun sistem manajemen dan koordinasi untuk memungkinkan tata kelola, pengaturan kelembagaan, kepemimpinan dan koordinasi yang efektif.

2. *Last Mile Plan for EMTCT (Elimination of Mother-to-Child Transmission)*

Last Mile Plan merupakan sebuah inovasi dalam upaya pencegahan penyebaran HIV dari ibu ke anak melalui sebuah sistem pemantauan sederhana secara bertingkat untuk pemantauan kinerja berkelanjutan, dengan berfokus pada angka daripada persentase (UNICEF South Africa, 2016). Penyebaran HIV dari ibu ke anak terjadi ketika seorang wanita HIV-positif menularkan virus ke bayi selama kehamilan,

persalinan dan melahirkan, atau setelah melahirkan melalui menyusui (UNICEF, 2020a).

Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa “mil terakhir” dalam perjalanan panjang untuk sepenuhnya mengalahkan transmisi vertikal telah terbukti menjadi yang paling sulit untuk dilalui, dan bahwa diperlukan pendekatan baru yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mengurangi jumlah infeksi HIV pada bayi baru lahir di tingkat negara sehingga tujuan akhir yaitu eliminasi dapat terlihat. Metode ini memperhatikan keperluan darurat untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, untuk memastikan bahwa semua wanita dan pasangannya menerima kualitas seksual dan pendidikan serta layanan kesehatan reproduksi, dan agar semua anak mendapatkan layanan kesehatan anak yang komprehensif untuk meningkatkan kesehatan dan perkembangan secara keseluruhan (Gray & Vawda, 2017).

Metode ini juga mewakili pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mengurangi jumlah infeksi HIV bayi baru lahir di tingkat negara. Pendekatan berbasis data ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan program dalam pencegahan penularan dari ibu ke anak melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan utama dan kemudian merencanakan dan memprioritaskan strategi baru untuk mengatasi kesenjangan tersebut (Albertini & Pintye, 2020).

Hasilnya adalah terjadi penurunan jumlah kematian bayi baru lahir akibat AIDS, sebanyak 178.225 kasus di tahun 2010 dan menjadi 82.432 kasus di tahun 2018 (Department of Statistics South Africa, 2021). Hal ini juga tentu mempengaruhi jumlah tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun, dimana pada tahun 2010 sebanyak 52 kasus per 1.000 kelahiran dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 35 kasus per 1.000 kelahiran (UNICEF, 2023c).

3. Bantuan Pendidikan

Di bidang pendidikan, UNICEF mendukung pengembangan sumber daya untuk pelatihan guru matematika di kelas 3, 6, dan 9, serta 90 master trainers dari semua provinsi telah dilatih untuk pelatihan guru tersebut (UNICEF South Africa, 2016). UNICEF juga berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan inklusif melalui berbagai pendekatan, termasuk dalam menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan, mengembangkan alat untuk mengidentifikasi peserta didik yang berisiko putus sekolah, mengembangkan standar untuk kualifikasi kelulusan untuk kelas 9 dan membuat alat diagnostik untuk meningkatkan penilaian terhadap pembelajaran berdasarkan tingkat kinerja penilaian nasional tahunan untuk matematika dan bahasa.

Tak hanya itu, UNICEF Afrika Selatan juga memfasilitasi dan menjadi tuan rumah sejumlah pembelajaran dan kunjungan pertukaran resmi dari negara lain ke Afrika Selatan. Pada Februari 2016, dua delegasi senior Kementerian Pendidikan Federal AS dan enam akademisi senior yang didukung oleh Universitas *North Carolina-Charlotte*, Kansas dan Connecticut melakukan kunjungan pertukaran kembali ke Afrika Selatan dengan fokus pada pendidikan inklusif, pencegahan putus sekolah, dan perawatan serta bantuan dukungan.

Hasilnya adalah terjadi penurunan persentase anak yang berhenti sekolah dengan alasan keuangan, pada tahun 2013 lebih dari seperempat atau sekitar 25,3 persen berhenti sekolah dengan alasan keuangan (Department of Statistics South Africa, 2013) dan di tahun 2015 menurun menjadi sebesar 22,5 persen (Department of Statistics South Africa, 2015). Selain itu, penyidikan terhadap Sertifikat Senior Nasional melaporkan peningkatan tingkat kelulusan kelas 12 dari 70,7 persen pada

tahun 2015 menjadi 72,5 persen pada tahun 2016 (UNICEF South Africa, 2017a). Terdapat pula data penurunan jumlah anak usia 7-15 tahun yang putus sekolah, dari tahun 2010 sebanyak 118.665 anak menjadi 99.646 di tahun 2018.

4. Private Sector Fundraising and Donor

UNICEF di tahun 2015 mengembangkan program penggalangan dana yang bekerjasama dengan beberapa partner seperti *The LEGO Foundation*, *MacAid*, *Ryan Trust*, *Elma Foundations*, *FC Barcelona*, *Kimberly Clark*, *Weber Shandwick*, *Mango Airlines*, *South African Airways*, *Ster Kinekor*, *Nedbank*, *SABC* dan *Super Sport* (UNICEF South Africa, 2017a).

UNICEF juga menyelenggarakan Gala Dinner Penggalangan Dana pertamanya pada Mei 2017, dihadiri oleh lebih dari 180 perwakilan dari sektor korporasi, pemerintah, masyarakat sipil, media dan korps diplomatik, yang mengumpulkan dana hampir US\$ 50.000.

Hasilnya adalah pada akhir tahun 2017, pendapatan kotor dari pemberian perorangan tumbuh sebesar 48 persen dibandingkan dengan tahun 2016 dari US\$ 352.000 pendapatan pada akhir tahun 2016 menjadi US\$ 523.846 pada akhir tahun 2017, dan basis donatur penjamin tumbuh sebesar 35 persen dari 6.222 donatur pada akhir 2016 menjadi 8.127 donatur pada akhir 2017. Jumlah anak yang tinggal di rumah tangga miskin berkurang dari tahun 2005 sebanyak 7,9 juta anak tinggal di rumah tangga miskin menjadi 3,9 juta anak di tahun 2018 (Hall, 2021).

5. Program *Isibindi and Safe Parks*

Pada tahun 2016 UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Afrika Selatan dengan mendukung program *Isibindi and Safe Parks*, pemerintah melalui *National Association of Child Care Workers* (NACCW) dan UNICEF mengembangkan opsi intervensi perawatan dan perlindungan berbasis komunitas untuk anak-anak *Isibindi* (dalam bahasa Isizulu/Bantu berarti “keberanian”) yang merupakan program berbasis komunitas yang memperkuat keluarga dan membantu melindungi anak-anak dari pelecehan, penelantaran, dan kekerasan. Didukung oleh pemerintah, *Isibindi* berfokus pada kesejahteraan psikososial anak-anak dan remaja dengan mendukung pengasuhan positif di rumah tangga yang tidak mampu dan membantu keluarga mengakses layanan utama (National Association of Child Care Workers, 2014).

Termasuk mekanisme asuransi yang berkualitas, dan pendekatan pengembangan masyarakat, model *Isibindi* telah mendapat pengakuan publik, dan saat ini sedang ditingkatkan melalui inisiatif pemerintah Afrika Selatan. Komponen tambahan dari model ini termasuk *Young Women’s Empowerment Program*, *Young Men’s Empowerment Program*, model PAUD berbasis non-pusat dan model disabilitas, semuanya memungkinkan realisasi progresif dari berbagai hak anak dan kebutuhan perlindungan, melalui penerapan yang efektif pekerja perawatan anak dan remaja berbasis komunitas.

Inti dari model *Isibindi* adalah penyediaan layanan pengasuhan anak dan remaja untuk anak dan remaja di rumah mereka oleh *child and youth care workers* (CYCW) yang terlatih dan diawasi. Tujuan utama mereka adalah memberikan bantuan praktis dan terapeutik setiap hari kepada anak-anak dan remaja dalam ruang kehidupan mereka.

Hasilnya adalah hampir 300 proyek *Isibindi* telah direplikasi di seluruh provinsi Afrika Selatan, melayani lebih dari 100.000 anak yang seharusnya berada di luar

matriks perawatan dan perlindungan (UNICEF South Africa, 2017b). Di tahun 2017 program ini telah menjangkau 350.000 anak melalui kunjungan ke rumah serta akses ke 400 *Safe Parks* di sembilan provinsi. Selain itu, dari program ini sebanyak lebih dari 6.500 pria dan wanita telah direkrut dan dilatih untuk menjadi pekerja perawat bagi anak dan remaja dan tidak lagi menjadi pengangguran. Terjadi pengurangan kasus kekerasan dan kejahatan pada anak pada tahun 2010/2011 sebanyak 54.225 kasus menjadi 43.450 kasus pada tahun 2017/2018.

Peran UNICEF Sebagai Organisasi Internasional dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak di Afrika Selatan

Sebagai salah satu aktor yang berperan di dalam dinamika hubungan internasional, UNICEF dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan tentu tidak terlepas dari peran yang dijalankannya sebagai organisasi internasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Clive Archer, bahwa organisasi internasional memiliki peran sebagai instrumen, arena, dan aktor.

1. Instrumen

Peran yang pertama dijalankan oleh UNICEF yaitu peran sebagai instrumen, dimana secara tidak langsung, sejak pembukaan *Country Office*-nya di Afrika Selatan pada tahun 1994 membuat UNICEF menjadi salah satu instrumen bagi negara Afrika Selatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya di bidang kesehatan dan perlindungan bagi anak dan wanita.

2. Arena

Peran yang kedua dijalankan oleh UNICEF yaitu peran sebagai arena, menjadi wadah atau tempat untuk berkumpul atau mengadakan forum sebagai langkah awal pengambilan suatu tindakan dimana hal ini dapat dilihat dari upaya UNICEF yaitu:

- a) UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Afrika Selatan dalam merumuskan *National Integrated Early Childhood Development Policy* pada tahun 2015, dilihat dari UNICEF menjadi wadah untuk berdiskusi dan bekerjasama dalam merumuskan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah Afrika Selatan
- b) UNICEF memfasilitasi dan menjadi tuan rumah kunjungan pembelajaran dari negara lain ke Afrika Selatan pada program bantuan pendidikan.

3. Aktor

Lalu peran yang terakhir yang dijalankan oleh UNICEF yaitu peran sebagai aktor, organisasi internasional memiliki kemampuan atau kapasitas aktor yang independen tanpa adanya intervensi dari pihak luar dalam menjalankan kebijakannya dimana peran ini dijalankan di hampir semua upaya-upaya UNICEF dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan yang telah dijabarkan sebelumnya seperti:

- a) Mendukung program *Isibindi and Safe Parks* dalam melakukan identifikasi daerah terkait atau wilayah yang membutuhkan, mencari dana bantuan, dan menyalurkan bantuan pelayanan.
- b) Mengadakan kerjasama dengan beberapa sektor privat dan mengadakan Makan Malam Gala Penggalangan dana untuk mengumpulkan bantuan.
- c) Mengembangkan metode *Last Mile Plan* dalam mengatasi permasalahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak.
- d) Berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak di Afrika Selatan dalam menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan, mengembangkan alat

identifikasi peserta didik yang berisiko putus sekolah, mengembangkan standar untuk kualifikasi kelulusan untuk kelas 9 dan membuat alat diagnostik untuk meningkatkan penilaian terhadap pembelajaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian upaya UNICEF dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan pada tahun 2015 - 2018.

Beberapa upaya UNICEF dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan yaitu bekerjasama dengan pemerintah Afrika Selatan dalam merumuskan *National Integrated Early Childhood Development Policy* dengan tujuan agar sistem layanan terhadap anak-anak lebih terorganisir dan tepat sasaran. Menciptakan inovasi pada strategi dalam mengurangi penularan HIV melalui *Last Mile Plan for EMTCT (Elimination of Mother-to-Child Transmission)* dengan tujuan sebagai peningkatan sistem peninjauan secara berkelanjutan. Memberikan bantuan pendidikan dimana UNICEF mendukung pengembangan sumber daya untuk pelatihan guru matematika, meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, memfasilitasi dan menjadi tuan rumah sejumlah pembelajaran dan kunjungan pertukaran resmi dari negara lain ke Afrika Selatan. Melakukan pengumpulan dana melalui *Private Sector Fundraising and Donor* yang bertujuan untuk membantu UNICEF menjalankan program-program untuk menyejahterakan anak. Bersama pemerintah dan NACCW mendukung program *Isibindi dan Safe Parks* yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dalam perlindungan dari pelecehan, penelantaran, dan kekerasan serta memiliki ruang rekreasi yang dapat dijadikan tempat mereka bermain serta belajar.

Jika dilihat dari peran yang dijalankan UNICEF sebagai organisasi internasional dalam beberapa upayanya meningkatkan kesejahteraan anak di Afrika Selatan yang sudah disebutkan, UNICEF menjalankan semua peran organisasi internasional yaitu yang pertama peran sebagai instrumen, yang kedua peran sebagai arena, dan peran sebagai aktor.

Melihat hasil dari tiap-tiap program yang dijalankan oleh UNICEF, dapat disimpulkan bahwa upaya UNICEF memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anak di Afrika Selatan yang dapat dilihat dari data yang menunjukkan kondisi membaik di setiap programnya. Namun hal ini dirasa masih belum cukup, perjalanan UNICEF dan Pemerintah Afrika Selatan masih panjang untuk segera tidak hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan anak tetapi memastikan semua anak-anak di Afrika Selatan hidup dengan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Albertini, J., & Pintye, J. (2020). *Key Considerations for Programming and Prioritization Going The "Last Mile" to EMTCT: A road map for ending the HIV epidemic in children.*
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (Third). Routledge.
- Children's Bureau. (2020, October 7). *Key Indicators of a Child's Well-being.*
<https://www.all4kids.org/news/blog/key-indicators-of-a-childs-well-being/>

- Department of Foreign Affairs Republic of South Africa. (2003). *United Nations Children's Fund (UNICEF)*.
<http://www.dirco.gov.za/foreign/Multilateral/inter/unicef.htm>
- Department of Social Development. (2015). *National Integrated Early Childhood Development Policy 2015*.
- Department of Statistics South Africa. (2013). *General Household Survey*.
- Department of Statistics South Africa. (2015). *General Household Survey*.
- Department of Statistics South Africa. (2021). *Statistical Release Mid-year population estimates*. www.statssa.gov.za, info@statssa.gov.za, Tel+27123108911
- Gray, A., & Vawda, Y. (2017). *South Africa Health Review 2017*.
- Hall, K. (2021). *Children Count, Statistics on Children in South Africa: Child Poverty*.
<http://childrencount.uct.ac.za/indicator.php?domain=2&indicator=98>
- Kilkelly, U., & Liefwaard, T. (2019). Legal implementation of the UNCRC: lessons to be learned from the constitutional experience of South Africa. *De Jure*, 52(spe).
<https://doi.org/10.17159/2225-7160/2019/v52a30>
- Litenatsky, Y. (2023). *10 NGOS IN SOUTH AFRICA WORKING TO MAKE A DIFFERENCE*. <https://hurisa.org.za/10-ngos-in-south-africa-working-to-make-a-difference/>
- Loffell, J., Allsopp, M., Atmore, E., & Monson, J. (2008). *Human resources needed to give effect to children's right to social services*.
- National Association of Child Care Workers. (2014). *Isibindi Safe Parks*.
<https://www.naccw.org.za/isibindi/safe-parks>
- Niekerk, J. van. (2008). *The Status of Child Abuse and Neglect Policy and Child Protection Practice in South Africa*. www.cpcj.org.za
- Plessis, P. Du. (2007). *Children and poverty in South Africa: the right to social security FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF A CODE OF CONDUCT FOR LEARNERS: A STRATEGY FOR IMPROVING DISCIPLINE IN SCHOOLS* View project. <http://www.academicjournals.org/ERR>
- SAPS Strategic Management. (2012). *South African Police Service Annual Report 2011/2012*.
- September, R. L. (2006). The Progress of Child Protection in South Africa. *International Journal of Social Welfare*, 15(SUPPL. 1), 65–72.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2006.00446.x>
- Triegaardt, J. D. (2005). The Child Support Grant in South Africa: a social policy for poverty alleviation? *Int J Soc Welfare*, 249–255.
- UNAIDS. (2021). *Country factsheets, SOUTH AFRICA*.
- UNICEF. (2020a). *Going The 'Last Mile' to EMTCT: A road map for ending paediatric HIV worldwide*.
- UNICEF. (2020b). *What we do*. <https://www.unicef.org/southafrica/what-we-do>
- UNICEF. (2023a). *Convention on the Rights of the Child text*.
<https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>

- UNICEF. (2023b). *Early childhood development*. <https://www.unicef.org/early-childhood-development>
- UNICEF. (2023c). *UNICEF Data Warehouse*.
https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/
- UNICEF South Africa. (2008). *UNICEF South Africa Annual Report 2008*.
- UNICEF South Africa. (2010). *UNICEF South Africa Annual Report 2010*.
- UNICEF South Africa. (2016). *UNICEF South Africa Annual Report 2016*.
- UNICEF South Africa. (2017a). *UNICEF South Africa 2017 Highlights*.
- UNICEF South Africa. (2017b). *Isibindi and Safe Parks Brief*.
- Viviers, A. (2013). *The study on Violence Against Children in South Africa Special Summary for Teens*. www.unicef.org/southafrica
- WHO. (2005). *Summary Country Profile for HIV/AIDS Treatment Scale-Up*.
www.who.int/3by5